



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SURYO WIYONO
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 643181

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.567.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m²/150 m² di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
2. Tanah Seluas 380 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 242.000.000
3. Tanah Seluas 313 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/100 m² di KAB / KOTA BOJONEGORO, WARISAN Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 3000 m² di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 282.000.000

1. MOBIL, MITSIBUSHI PAJERO SPORT 2.4 L Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. MOTOR, HONDA K1H02N1410 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 683.491.689

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.582.491.689

**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

2.582.491.689

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.